



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI VII DPR RI DENGAN KEPALA BPH MIGAS

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 16 (Enam Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BPH Migas
Hari, tanggal	: Rabu, 12 Februari 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 15.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Evaluasi Kinerja BPH Migas Tahun 2019 2. Evaluasi BBM satu harga 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. P. Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 27 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 7 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 17 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 12 Februari 2020 dibuka pukul 10.20 WIB yang dipimpin oleh H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM, CA selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Evaluasi Kinerja BPH Migas Tahun 2019

- b. Evaluasi BBM satu harga
 - c. Lain-lain
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif sekaligus menjadi bahan evaluasi kita bersama agar kinerja sektor hilir migas di tahun 2020 menjadi lebih baik lagi, diantaranya mengenai:
 1. Perkembangan program BBM satu harga tahun 2019
 2. Penetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa untuk mendukung target harga gas industri sebesar US\$ 6 / MMBTU
 3. Realisasi infrastruktur Gas Bumi sepanjang tahun 2019
 4. Kontribusi BPH Migas terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2019
 5. Realisasi Jenis BBM Tertentu/Subsidi (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tahun 2019
 4. Penjelasan Kepala BPH Migas sebagai berikut :
 - a. Capaian Kinerja BPH Migas



b. Evaluasi BBM satu harga

Target Program BBM 1 Harga sebanyak 170 Penyalur s.d tahun 2019 dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan keadilan di bidang energi diseluruh wilayah NKRI khususnya bagi masyarakat pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Pemerintah membuat program revolusioner berupa BBM 1 Harga.

Program BBM 1 Harga ditargetkan sebanyak 170 titik penyalur hingga akhir tahun 2019 dengan penugasan kepada PT. Pertamina (Persero) sebanyak 160 titik penyalur dan PT. AKR Corporindo Tbk. sebanyak 10 titik penyalur. BPH Migas sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan BBM 1 Harga telah berhasil mengawal program tersebut hingga dapat diselesaikan lebih cepat pada bulan Oktober 2019. Lokasi Program BBM 1 Harga tersebar di Wilayah 3T yang meliputi 31 Penyalur di Sumatera, 42 di Kalimantan, 3 di Jawa dan Madura, 2 di Bali, 17 di Sulawesi, 25 di NTB dan NTT, dan 50 Penyalur di Maluku dan Papua.

c. Kendala Program Akselerasi BBM 1 Harga 2017-2019

- 1) Faktor Keamanan di beberapa lokasi tertentu
Mengakibatkan Pendistribusian BBM dari TBBM ke Penyalur dan konsumen terbengkalai (khusus Wilayah Papua)
- 2) Akses Pendistribusian BBM yang sulit ditempuh
 - a) Insfrastruktur Akses
 - b) Keterbatasan Moda Transportasi
- 3) Perizinan Pemda
 - a) Ketidakseragaman Sistem Perizinan
 - b) Terkendala RT RW kabupaten pada umumnya seperti pada Daerah Badan Otoritas Pariwisata (Manggarai Barat)
 - c) Sulitnya mendapatkan Rekomendasi Bupati
 - d) Sulitnya Rekomendasi UKL/UPL
- 4) Sulit mencari investor
Kurang berminat untuk investasi di daerah-daerah 3T dikarenakan Faktor Keamanan, Akses sulit, dan Perizinan Pemda

- 5) Terkendala Formula Harga
 - a) Sejak tanggal 11 Mei 2019 PT AKR Corporindo, Tbk. tidak menyalurkan JBT
 - b) Dari 10 penyalur BBM 1 Harga eksisting PT AKR Corporindo, Tbk. sejak 1 Juni 2019 sampai saat ini terdapat 4 penyalur yang tetap beroperasi dengan menyalurkan JBU (Solar *Non* Subsidi dan Akra 92)

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Kepala BPH Migas untuk meningkatkan jumlah lembaga penyalur BBM satu harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pelaksanaan program BBM satu harga dapat tercapai sesuai target.
2. Komisi VII DPR RI mendukung Kepala BPH Migas untuk mendorong pembangunan sub penyalur dan mini SPBU yang belum memiliki penyalur.
3. Komisi VII DPR RI melalui Kepala BPH Migas meminta Kementerian ESDM RI untuk segera menerbitkan regulasi teknis operasional terkait pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, penetapan jumlah cadangan BBM nasional, serta penetapan revisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) tahun 2020-2038.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan data realisasi Jenis BBM Tertentu khususnya solar tahun 2017-2019 dan proyeksi tahun 2020, serta penjabaran data alokasi kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan per Kabupaten/Kota dan SPBU.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan hasil audit BPK RI tahun 2019 terkait pendistribusian BBM melalui SPBU di seluruh Indonesia.

6. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pengawasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu serta Jenis BBM Khusus Penugasan agar tepat sasaran.
7. Komisi VII DPR RI mendukung Kepala BPH Migas dalam memperkuat fungsi dan tugas kelembagaan di sektor hilir migas.
8. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menjaga tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa tahun 2020 di seluruh wilayah Indonesia agar harganya berada dalam kisaran tarif tertimbang sebesar USD 0,353/MSCF.
9. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 19 Februari 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.15 WIB

KEPALA BPH MIGAS

Jakarta, 12 Februari 2020
KETUA RAPAT,

DR. M. FANSHURULLAH ASA, MT

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA
A-63